

**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMBELAJARAN DARING DALAM
PROSES BELAJAR MENGAJAR TAHUN 2021 DI SMAN 5 KUNDUR
KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN**

**Oleh:
Wirindiany
NIM.180563201024
ABSTRAK**

Pembelajaran daring merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung melainkan melalui jaringan internet. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pencapaian pemerataan terhadap pembelajaran yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan sistem pembelajaran daring dalam proses belajar mengajar tahun 2021 di SMAN 5 Kundur Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data, data primer dan sekunder, serta menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima indikator kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembelajaran Daring Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun 2021 Di SMAN 5 Kundur Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun belum berjalan dengan baik dilihat dari indikatornya. (1)Efektifitas, pelaksanaannya tidak berjalan efektif dikarenakan pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat banyak kendala. (2)Efisiensi, pelaksanaannya belum efisien dikarenakan masih terdapat banyak kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang belum memenuhi kebutuhan pendidikan. (3)Kecukupan, pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan pada pelaksanaannya memiliki kendala seperti kuota internet belajar dan jaringan internet yang tidak stabil. (4)Keadilan, pelaksanaannya sudah optimal hal ini bisa dilihat dari pembagian kuota internet belajar yang diberikan kepada siswa dan guru untuk melakukan pembelajaran daring. (5)Responsivitas, pelaksanaannya belum optimal dikarenakan belum menerapkan standar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. (6)Ketepatan, pelaksanaannya tidak tepat sasaran dikarenakan pelaksanaan pembelajaran daring masih banyak memiliki kekurangan dan kendala. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam melaksanakan pengevaluasian kebijakan ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakn belum berjalan dengan optimal dan masih banyak kendala dalam penerapannya. Saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya kerjasama yang lebih baik lagi dari Dinas terkait dan Sekolah agar pelaksanaan Pembelajaran Daring Dalam Proses Belajar Mengajar Di SMAN 5 Kundur berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pembelajaran Daring

**EVALUATION OF POLICY FOR ONLINE LEARNING SYSTEMS IN THE
TEACHING AND LEARNING PROCESS AT SMAN 5 KUNDUR, UNGAR
DISTRICT, KARIMUN REGENCY IN 2021**

By:
Wirindiany
NIM.180563201024

ABSTRACT

Online learning is a learning activity that is carried out without going through face-to-face meetings but through the internet network. The government has designed various new policies in order to suppress the spread and deal with this virus. One of them is the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the national education system, Law Number 12 of 2012 concerning higher education, and Regulation of the Minister of Education and Culture Number 109 of 2013 concerning the implementation of distance education in higher education. The aim is to increase the achievement of equity in quality learning. This study aims to evaluate the policies of the online learning system in the 2021 teaching and learning process at SMAN 5 Kundur, Ungar District, Karimun Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with data sources (primary and secondary) and uses observational data collection, interviews, and documentation. In this study, researchers used five policy indicators proposed by William N. Dunn. The results of the study show that the implementation of online learning in the teaching and learning process in 2021 at SMAN 5 Kundur, Kundur District, Karimun Regency has not gone well, as seen from the indicators. (1) Efficacy. The implementation is not running effectively because there are still many obstacles. (2) Efficiency. The implementation is not efficient because there are still many obstacles, such as the lack of school facilities and infrastructure, that have not met educational needs. (3) Adequacy: the implementation is still not optimal because it has constraints such as learning internet quotas and an unstable internet network. (4) Justice. The implementation is optimal, as can be seen from the distribution of internet learning quotas given to students and teachers to carry out online learning. (5) responsiveness; the implementation is not optimal because it has not implemented the policy standards set by the government. (6) Accuracy. The implementation is not right on target because the implementation of online learning still has many shortcomings and obstacles. The study's conclusion is that it was discovered during policy evaluations that policy implementation was not running optimally and that there were still many obstacles in its implementation. The suggestion from this research is that there needs to be even better collaboration from related agencies and schools so that the implementation of online learning in the teaching and learning process at SMAN 5 Kundur goes well.

Keywords: Policy Evaluation, Online Learning